



## *Mosque-based anti-corruption village: Community empowerment program in Prenggan, Kemantren Kotagede Yogyakarta*

Suyadi<sup>1</sup>, Waharjani<sup>1</sup>, Sumaryati<sup>1</sup>, Trisna Sukmayadi<sup>1</sup>, Saedah Binti Siraj<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

[suyadi@mpai.uad.ac.id](mailto:suyadi@mpai.uad.ac.id)

<https://doi.org/10.31603/ce.7579>

### Abstract

Village Prenggan, Kemantren Kotagede Yogyakarta has been piloting an anti-corruption village by the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) since 2013. However, until now (2022) the village has not succeeded in becoming an anti-corruption village. In fact, the KPK prefers Kelurahan Panggunharjo, Bantul Regency as the first anti-corruption village in Yogyakarta. This is because the anti-corruption village programs in Prenggan have not been carried out thoroughly. This article is the result of a community empowerment program in Prenggan village towards an anti-corruption village. The target partner groups for this community service are the Prenggan Mubaligh Association (Paguyuban Mubaligh Prenggan) and the TK ABA Komplek Masjid Perak Yogyakarta. The methods used are training, counseling and anti-corruption assistance. The results of this community service show that: 1) The Prenggan Mubaligh Association has succeeded in developing anti-corruption propaganda gendhings. Every preacher who preaches always carries a message of anti-corruption values with a touch of art; 2) The TK ABA Komplek Masjid Perak, which originally had an anti-corruption literacy reading, has now succeeded in completing it with anti-corruption exercises. Anti-corruption literacy is a ratio exercise, while anti-corruption gymnastics is a sport. As for the values of Islam and Aisyiyahan are the feelings or the heart. Thus, the TK ABA Komplek Masjid Perak combines ratio training through anti-corruption literacy, sports through anti-corruption gymnastics, and heart exercises through Islamic values. In fact, this school became the prototype of the first anti-corruption school at the early childhood level in Indonesia. Thus, a mosque-based anti-corruption village that is more bottom-up in nature can be a complement to the anti-corruption village formed by the KPK which is more top-down.

**Keywords:** Anti-corruption village; Anti-corruption mubaligh association; Anti-corruption literacy

## **Desa antikorupsi berbasis masjid: Program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede Yogyakarta**

### Abstrak

Kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede Yogyakarta merupakan piloting desa antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2013. Namun hingga saat ini (2022) desa tersebut belum berhasil menjadi desa antikorupsi. Bahkan, KPK lebih memilih Kelurahan Panggunharjo, Kabupaten Bantul sebagai desa antikorupsi pertama di Yogyakarta. Hal ini dikarenakan program-program desa antikorupsi di Prenggan belum dilakukan secara menyeluruh. Artikel ini merupakan hasil program pemberdayaan masyarakat di desa Prenggan menuju desa antikorupsi. Kelompok mitra sasaran pengabdian masyarakat ini adalah Paguyuban Mubaligh Prenggan dan TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan. Metode yang digunakan adalah pelatihan, penyuluhan dan

pendampingan antikorupsi. Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa: 1) Paguyuban mubaligh Prenggan berhasil mengembangkan gendhing-gendhing dakwah antikorupsi. Setiap dai yang berdakwah selalu membawa pesan nilai-nilai antikorupsi dengan sentuhan seni; 2) TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan yang semula memiliki pojok baca literasi antikorupsi, kini berhasil melengkapi dengan senam antikorupsi. Literasi antikorupsi merupakan olah rasio, sedangkan senam antikorupsi merupakan olahraga. Adapun nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Aisyiyahan merupakan olah rasa atau olah hati. Dengan demikian, TK ABA Komplek Masjid Perak mengombinasikan olah rasio melalui literasi antikorupsi, olah raga melalui senam antikorupsi, dan olah hati melalui nilai-nilai Islami. Bahkan, sekolah ini menjadi prototipe sekolah antikorupsi pada jenjang anak usia dini pertama di Indonesia. Dengan demikian, desa antikorupsi berbasis masjid yang lebih bersifat bottom up dapat menjadi pelengkap bagi desa antikorupsi bentukan KPK yang lebih bersifat top down..

**Kata Kunci:** Desa antikorupsi; Paguyuban mubaligh antikorupsi; Literasi antikorupsi

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara religius yang memiliki 6 agama resmi dan semuanya melarang korupsi. Dalam agama Islam, khususnya buku *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah* dalam Anwar (2006) disebutkan bahwa korupsi merupakan dosa besar bahkan “syirik akbar” (QS. Al-Maidah 62-63). Tetapi, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) masih sangat rendah, yakni 38 pada tahun 2021 (Wibowo, 2022). Bahkan, di masa COVID-19 IPK Indonesia sempat merosot 3 poin dari tahun 2019 sebanyak 40 menjadi 37 di tahun 2020 (Suyatmoko, 2021). Negara-negara yang bersih dari korupsi pada kenyataannya bukan dari negara-negara agama, termasuk negara-negara Islam, melainkan justru negara-negara sekuler yang memisahkan agama dari sistem pemerintahan seperti Denmark dan Finlandia dengan IPK 88. Hal ini menunjukkan bahwa agama belum berkontribusi bagi pencegahan korupsi. Padahal, agama memiliki potensi besar dalam upaya pencegahan korupsi secara terstruktur dan sistematis. Keberadaan khatib, mubaligh, dai, romo, pastor, dan tokoh-tokoh agama lainnya dapat menyampaikan pesan antikorupsi secara masif dalam setiap siraman rohani.

Korupsi kini tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat dan daerah atau kabupaten kota, tetapi sudah masuk ke desa-desa (Suyadi, 2021b). Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa pada tahun 2020, dari 152 kasus korupsi, 141 adalah korupsi dana desa. Pada semester I tahun 2021 dari 197 kasus korupsi, 62 di antaranya adalah korupsi dana desa (KPK, 2021). Hingga saat ini, sudah tercatat ada 132 kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Padahal, dengan adanya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, seharusnya membuka peluang strategi bagi pembangunan daerah berbasis desa. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan optimal, pertumbuhan ekonomi merangkak naik, dan kualitas pendidikan masyarakat desa juga meningkat.

Dalam buku *Panduan Desa Antikorupsi*, terdapat beberapa modus korupsi dalam pengelolaan dana desa, beberapa di antaranya adalah pembuatan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) di atas harga pasar, meminjam sementara dana desa ke rekening pribadi, pemotongan dana desa, perjalanan dinas fiktif, *mark up* honorarium perangkat desa, hingga pembayaran ATK yang tidak sesuai dengan *real cost* (KPK, 2021). Di buku itu

juga, disebutkan tata cara pencegahan korupsi melalui pemberdayaan pemerintah desa, mulai dari pengaturan regulasi hingga peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat desa. Pemerintah desa juga bisa melakukan penilaian mandiri melalui *self evaluation* dengan mengacu pada indikator-indikator yang tersedia untuk mengetahui apakah desanya memenuhi syarat desa antikorupsi atau belum. Sebagai piloting, KPK juga sudah menetapkan 10 desa antikorupsi. Di Yogyakarta, Panggungharjo menjadi satu-satunya desa antikorupsi. Harapannya ke depan, semakin banyak desa antikorupsi, sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya *top down* tetapi juga *bottom up*.

Kelurahan Prenggan Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, merupakan salah satu desa yang dikembangkan menjadi desa antikorupsi (Rusqiyati, 2019), melengkapi Kelurahan Panggungharjo yang sudah terlebih dahulu desa antikorupsi pertama di Yogyakarta (Edi, 2021). Prenggan sebenarnya lebih awal dipilih KPK sebagai piloting desa antikorupsi sejak tahun 2013. Desa ini dipilih dengan pertimbangan memiliki tradisi dan budaya luhur yang sejalan dengan nilai-nilai antikorupsi (Suyadi, 2020b). Oleh karena itu, KPK mulai melakukan intervensi program-program kegiatan untuk mendukung Prenggan sebagai desa antikorupsi. Salah satu program unggulan yang dilakukan adalah budaya antikorupsi berbasis keluarga, di mana ibu dan anak menjadi agen pencegahan korupsi di tingkat keluarga. Hal ini penting dilakukan, karena pencegahan korupsi harus dimulai pada lingkup yang paling kecil, yakni keluarga.

Akan tetapi, program KPK ini berhenti sejak tahun 2017 dan belum ada generasi yang melanjutkannya kembali. Program yang masih berjalan baru menyentuh ranah keluarga, khususnya ibu dan anak. Sedangkan elemen masyarakat lainnya yang memiliki potensi besar, seperti Karang taruna, Paguyuban Mubaligh Prenggan, TK ABA Prenggan dan lain-lain belum tersentuh program dari KPK tersebut.

Tim pengabdian melakukan analisis situasi di kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta mulai Jum'at 6 Mei sampai dengan Sabtu 2 Juli 2022, baik kepada Lurah Prenggan, Paguyuban Mubaligh Prenggan, dan TK ABA Kompleks Masjid Perak Prenggan Kotagede Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa Prenggan memiliki dua kelompok mitra yang menjadi garda depan pencegahan korupsi, yakni Paguyuban Mubaligh antikorupsi dan sekolah antikorupsi TK ABA Kompleks Masjid Perak. Kedua kelompok mitra tersebut telah dibina oleh para penyuluh antikorupsi dari KPK yang bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan sejak 2020-2021. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi berbasis kearifan lokal, terutama sentuhan nilai-nilai ke-Islaman sangat menonjol. Sekadar contoh, paguyuban Mubaligh Prenggan telah berhasil mencipta satu gendhing dakwah antikorupsi. Di TK ABA Kompleks Masjid Perak, sudah mulai dirintis pojok baca literasi antikorupsi, bahkan mulai disemarakkan senam antikorupsi. Namun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut sifatnya masih baru permulaan, belum menjadi habituasi, mentradisi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mereka berharap agar kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi berbasis kearifan lokal, khususnya nilai-nilai keagamaan dapat dikembangkan.

Berdasarkan hasil analisis situasi terkini, Tim Pengabdian melakukan inovasi pencegahan korupsi berbasis masjid yang lebih masif. Beberapa di antaranya adalah mengembangkan pelatihan gendhing-gendhing dakwah antikorupsi bagi paguyuban Mubaligh Prenggan dan habituasi senam antikorupsi di TK ABA Kompleks Masjid Perak Prenggan. Dua kegiatan pada dua kelompok mitra ini sangat berbeda dengan pengembangan desa antikorupsi piloting KPK yang lebih banyak menyentuh pada reformasi birokrasi pemerintahan desa. Sedangkan pengembangan desa antikorupsi ini

lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan desa antikorupsi tersebut. Dengan demikian, program pemberdayaan masyarakat ini dapat melengkapi reformasi birokrasi pemerintahan desa menuju desa antikorupsi.

Sejauh ini program pemberdayaan desa antikorupsi belum banyak dilakukan. Bahkan, program-program pemberdayaan masyarakat di desa Pangunharjo yang dipilih KPK sebagai desa antikorupsi pertama di Indonesia juga belum banyak dilakukan (Edi, 2021). Namun, khusus program pemberdayaan masyarakat di desa Prenggan justru sudah mulai banyak dilakukan. Beberapa di antaranya adalah pelatihan dai antikorupsi, pelatihan senam antikorupsi di TK ABA Kompleks Masjid Perak, pengembangan pojok baca literasi dan numerasi antikorupsi (Suyadi, Sumaryati, et al., 2020; Waskito & Pambudi, 2018). Namun demikian, program-program kegiatan tersebut belum menunjukkan dampak yang signifikan bagi pengembangan Prenggan sebagai Desa Antikorupsi. Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan masyarakat yang mengembangkan kelompok mitra khususnya Paguyuban Mubaligh Prenggan dan TK ABA Kompleks Masjid Perak untuk membangun desa antikorupsi berbasis budaya lokal.

Artikel ini merupakan solusi terstruktur dan sistematis program pemberdayaan masyarakat berbasis budaya lokal atau kearifan lokal untuk mewujudkan Prenggan sebagai desa antikorupsi. Solusi terstruktur dan sistematis ini merupakan implementasi dari hasil-hasil penelitian tim pengabdian di bidang pendidikan antikorupsi. Beberapa di antaranya adalah integrasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan agama Islam dan sentra antikorupsi dalam pembelajaran anak usia dini. Di samping itu, program pemberdayaan masyarakat ini juga merupakan pengembangan dari program pemberdayaan sebelumnya, khususnya pelatihan dai antikorupsi dan pengembangan pojok baca literasi-numerasi antikorupsi.

## 2. Metode

---

### 2.1. Lokasi pengabdian

Lokasi pengabdian masyarakat ini adalah Kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta. Dipilihnya lokasi ini karena sejak 2013 merupakan piloting desa antikorupsi yang hingga saat ini cita-cita tersebut belum terwujud. Meskipun hingga tahun 2022 desa ini belum ditetapkan sebagai desa antikorupsi, namun program-program pemberdayaan masyarakat di bidang antikorupsi terus berjalan, termasuk program pemberdayaan masyarakat ini.

### 2.2. Kelompok mitra sasaran

Kelompok mitra dalam program pemberdayaan masyarakat ini terdiri dari dua sasaran. *Pertama*, Kelompok mitra pengabdian masyarakat adalah Paguyuban Mubaligh Prenggan, Kemantren Kotagede Yogyakarta. Paguyuban ini beranggotakan 25 Dai berusia 40-60 tahun (20 laki-laki dan 5 perempuan). Secara struktural, Paguyuban ini di bawah koordinasi Pimpinan Ranting Muhammadiyah Prenggan. Dipilihnya kelompok mitra Paguyuban Mubaligh Prenggan karena memiliki kompetensi antikorupsi dan memiliki aset kearifan lokal berupa seni karawitan. *Kedua*, TK ABA Kompleks Masjid Perak Prenggan. TK ini memiliki 12 guru (perempuan semua) dan peserta didik sebanyak 160 siswa. Dipilihnya sekolah ini karena sejak 2020 mulai mengembangkan pojok baca literasi antikorupsi dan kini telah menjadi sekolah penggerak.

### 2.3. Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan *Participatory Action Research (PAR)* (Pain, 2007; Whyte, 1991). Dipilihnya pendekatan PAR karena memiliki kekuatan untuk menyatukan peneliti dan masyarakat (Baum, 2016). Di samping itu, PAR juga dapat dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakatnya menuju perubahan yang direncanakan (Morales, 2016). Dalam hal ini, tim Peneliti dan Pengabdi menyatu dengan Paguyuban Mubaligh Prenggan untuk melakukan analisis situasi, perencanaan program kegiatan hingga aksi menuju perubahan. Dengan demikian, PAR mengintegrasikan antara partisipasi masyarakat, peneliti, dan aksi pengembangan potensi mitra.

PAR selalu berangkat dari ide dan gagasan akar rumput, terutama potensi masyarakat khususnya kelompok mitra, yakni Paguyuban Mubaligh Prenggan. Di samping itu, PAR dipandang lebih komprehensif karena di samping menerapkan hasil-hasil penelitian yang relevan sebelumnya, juga diorientasikan untuk menghasilkan pengetahuan baru sebagai siklus pengembangan keilmuan.

### 2.4. Prosedur pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan pengabdian ini mencakup tiga langkah. Setiap langkah selalu diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi sehingga menjadi siklus yang terus-menerus atau berkelanjutan. *Pertama*, analisis situasi terkini Paguyuban Mubaligh Prenggan. Kegiatan ini mencakup menjalin hubungan humanis, sosialisasi program, fokus *group discussion* terkait relevansi program kegiatan dan potensi mitra di bidang dakwah antikorupsi dan aset budaya berupa seni karawitan. *Kedua*, perencanaan dan kesepakatan program kegiatan. Dalam hal ini, perencanaan dan kesepakatan program dimulai dengan mencipta "Gendhing antikorupsi" sebagai materi pelatihan dakwah antikorupsi berbasis kearifan lokal. Termasuk dalam hal ini adalah kesepakatan teknis pelaksanaan dan pendampingan. *Ketiga*, pelatihan, pendampingan dan pentas dakwah kultural bermuatan antikorupsi dan berbasis kearifan lokal seni karawitan.

### 2.5. Waktu pelaksanaan

Program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan dakwah antikorupsi ini dilaksanakan setiap hari ahad sejak Juni hingga Agustus 2022. Sejak tahun 2018 Paguyuban Mubaligh Prenggan membentuk Grup Seni Musik Karawitan atas dukungan Dana Keistimewaan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, pada tahun 2019 Paguyuban Mubaligh Prenggan mendapat pelatihan Dai Antikorupsi dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah atas dukungan Kemendikbudristek (Suyadi, Waharjani, Sumaryati, & Sukmayadi, 2020; Suyadi, Waharjani, Sumaryati, Faturrahman, et al., 2020) Pengabdian masyarakat ini mengakumulasikan keduanya, yakni pelatihan untuk pengembangan dakwah antikorupsi berbasis kearifan lokal seni karawitan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

---

Hasil dan pembahasan program pemberdayaan masyarakat ini secara garis besar disajikan dalam dua temuan pokok. Pertama, gendhing dakwah antikorupsi bagi kelompok mitra paguyuban mubaligh Prenggan. Kedua, senam antikorupsi bagi kelompok mitra TK ABA Kompleks Masjid Prenggan. Dua program pemberdayaan



masyarakat merupakan jawaban atas permasalahan prioritas mitra dalam rangka mewujudkan Prenggan desa antikorupsi.

### 3.1. Pelatihan gendhing dakwah antikorupsi

Sebelum Tim Pengabdian masuk ke Kelurahan Prenggan, Paguyuban Mubaligh Prenggan telah memiliki aset kultural berupa seni karawitan “Sekar Mentalok.” Seluruh anggota paguyuban biasanya selalu latihan nembang gendhing-gendhing jawa setiap hari Jum’at malam Sabtu. Namun, gendhing-gendhing jawa tersebut adalah gendhing-gendhing yang sudah lazim dilantunkan para paguyuban seni karawitan lain pada umumnya. Tidak ada gendhing-gendhing baru yang lahir dari Paguyuban Mubaligh Prenggan ini. SKJ, ketua paguyuban Mubaligh menyatakan:

“Selama ini kita latihan yang hanya tabuhan tembang-tembang atau gendhing karawitan lama yang sudah ada karena memang tujuannya untuk melestarikan budaya. Jadi kita bisa tabuhan saja sudah bagus, karena memang banyak gendhing yang belum bisa kita nyanyikan.” (Wawancara dengan SKJ pada 1 Juni 2022).

Pernyataan SKJ tersebut menegaskan bahwa tujuan dari latihan seni karawitan adalah untuk melestarikan budaya. Hal ini senada dengan teori kebudayaan yang menyatakan bahwa tradisi harus dijaga dan dilestarikan (Triwardani & Rochayanti, 2014). Namun hal itu bukan berarti menutup kemungkinan bagi lahirnya gendhing-gendhing baru dengan tetap bernafaskan seni karawitan. Dengan kata lain, melestarikan budaya dengan inovasi gendhing-gendhing baru.

Pada tahun 2021, tim pengabdian menginisiasi penciptaan gendhing dakwah antikorupsi. Gendhing ini merupakan karya cipta bersama antara tim pengabdian dengan paguyuban Mubaligh Prenggan. Bahkan, gendhing ini telah mendapatkan hak cipta nomor 000257159 (Suyadi, 2021a). Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa satu gendhing saja tidak cukup. Bahkan, Paguyuban Mubaligh sendiri menghendaki adanya satu album gendhing dakwah antikorupsi yang berisi minimal 3- 5 gending. Dalam hal ini, SKJ menyatakan:

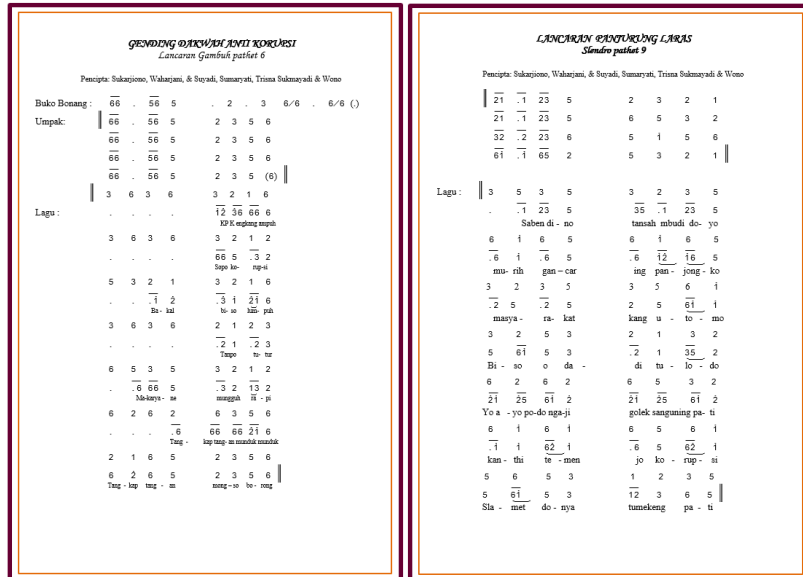
“Ternyata bagus juga gendhing dakwah antikorupsi yang baru ini. Tetapi kalau hanya satu gendhing, kurang gayeng (*ramai*). Bagaimana jika kita buat gendhing-gendhing dakwah antikorupsi baru yang lebih banyak sehingga bisa jadi satu album?” (Wawancara dengan SKJ pada 1 Juni 2022).

Pernyataan SKJ di atas menunjukkan bahwa tradisi dapat dilakukan inovasi atau dinamisasi (Abdilah, 2009). Melestarikan budaya bukan semata-mata hanya menyanyikan gendhing-gendhing yang sudah lama dan menjadi tradisi, melainkan dapat dilakukan dengan penciptaan gendhing-gendhing baru (Kariasa & Putra, 2021). Hal ini senafas dengan dinamika perubahan sosial dan budaya termasuk seni karawitan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tim pengabdian melakukan penciptaan gendhing dakwah antikorupsi yang ke-2 dan ke-3. Ke depan, gendhing-gendhing dakwah antikorupsi akan terus diciptakan dari Paguyuban Mubaligh Prenggan ini. Namun, untuk sementara, cukup diciptakan dua gendhing dakwah antikorupsi. Hal ini dikarenakan memang tidak mudah menciptakan gendhing dakwah antikorupsi baru dan menjadi tantangan tersendiri dalam setiap latihan.

Proses penciptaan gendhing dakwah antikorupsi dilakukan secara bersama-sama di Pendopo Balai Kajengan, yang merupakan tempat latihan seni karawitan. Pada awalnya,

Tim Pengabdian membuat lirik tembang atau gendhing dakwah antikorupsi. Kemudian, lirik tembang tersebut didiskusikan dan direvisi mengikuti kaidah gendhing-gendhing Jawa. Dalam prosesnya, setiap kata dalam lirik lagu dibahas makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Diskusi dan revisi tidak cukup dilakukan sekali apalagi sehari melainkan memakan waktu satu bulan dengan intensitas 4 kali diskusi dan revisi. **Gambar 1** merupakan tampilan kedua gendhing dakwah antikorupsi hasil ciptaan Tim Pengabdian dan mitra Paguyuban Mubaligh Prenggan tersebut.



Gambar 1. Gendhing dakwah antikorupsi

Gendhing pertama yang berjudul “KPK” (sekar gambuh), berisi sindiran kepada elit penguasa yang telah melemahkan bahkan melumpuhkan kesaktian KPK yang selama ini berani menangkap para koruptor. Sedangkan gendhing kedua dengan judul “Panjurung Laras” berisi seruan untuk mengajak mengaji dan menjauhi korupsi. Dengan demikian, dua lagu tersebut merupakan pesan-pesan dakwah Islam antikorupsi yang dibingkai dengan budaya, yaitu tradisi seni karawitan.

Selanjutnya, Tim Pengabdian bersama-sama mendampingi mitra Paguyuban Mubaligh Prenggan dalam pelatihan gendhing-gendhing dakwah ciptaannya sendiri tersebut. latihan ini dilaksanakan setiap Jum’at malam Sabtu sejak 3 Juni hingga 12 Agustus (10 kali latihan). Suasana latihan gendhing dakwah antikorupsi ini ditunjukkan pada **Gambar 2**. Pada latihan ke-12 diselenggarakan secara pentas seni dengan seragam yang rapi sebagaimana ditunjukkan **Gambar 3**.



Gambar 2. Latihan gendhing dakwah antikorupsi



Gambar 3. Pentas gendhing dakwah antikorupsi

Setelah melalui proses latihan selama 10 kali, termasuk pentas, dilakukan pengukuran tingkat keterampilan dakwah warga Paguyuban Mubaligh Prenggan. Instrumen untuk mengukur keterampilan dakwah antikorupsi ini merujuk pada instrumen observasi pengukuran perilaku koruptif yang telah dikembangkan sejak tahun 2020 (Suyadi, 2020a). Hasil pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara sebelum dan sesudah dilakukan pengabdian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1. Perbandingan pra dan pasca pelatihan aplikasi *Liveworksheets***

No	Sebelum Program Pengabdian	Setelah program Pengabdian
1	Paguyuban Mubaligh Prenggan memisahkan seni karawitan dari dakwah Islam.	Paguyuban Mubaligh Prenggan mampu mengombinasikan seni karawitan dalam konteks dakwah antikorupsi.
2	Paguyuban Mubaligh Prenggan dakwah antikorupsi secara lateral dan retorik.	Paguyuban Mubaligh Prenggan dakwah antikorupsi secara lateral, retorik dan estetik.
3	Paguyuban Mubaligh Prenggan terampil bermain seni karawitan murni.	Paguyuban Mubaligh Prenggan terampil mengisi seni tradisi Jawa dengan nilai-nilai dakwah antikorupsi.
4	Paguyuban Mubaligh Prenggan terlalu keras dan vulgar dalam dakwah antikorupsi.	Paguyuban Mubaligh Prenggan lebih <i>soft</i> dan berseni dalam menyampaikan dakwah Islam antikorupsi.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa pelatihan gendhing dakwah antikorupsi pada kelompok mitra Paguyuban Mubaligh Prenggan berdampak pada perubahan dan peningkatan kompetensi dakwah antikorupsi secara signifikan. Keterampilan dakwah antikorupsi tidak hanya pada ranah kognitif dan psikomotorik, namun juga afektif bahkan menyentuh ranah religiusitas.

### 3.2. Senam antikorupsi

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa kelompok mitra TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan telah merintis sekolah antikorupsi sejak 2020 (Suyadi, et al, 2022). Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan pojok baca literasi antikorupsi yang memadai sebagai media olah rasio (Sukmayadi, 2020). Selanjutnya, kehadiran Tim Pengabdian memperkaya program baru, yakni senam antikorupsi sebagai media olah raga, melengkapi olah rasio. Sedangkan olah rasa (spiritual) telah menjadi habituasi dalam ritual peribadahan dan doa-doa harian.

Senam antikorupsi merupakan senam yang di *launching* KPK sebagai media untuk internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui olahraga. Senam ini telah menjadi telah menjadi kegiatan rutin di banyak instansi, termasuk lembaga-lembaga PAUD sudah mulai mengembangkannya, terutama di TK Griya Bermain Pangkalpinang (Yusmaliana, 2022). Bahkan, pada tahun 2015 di Bojonegoro pernah memecahkan rekor MURI senam antikorupsi yang diikuti oleh lebih dari 100.000 siswa semua jenjang dari TK hingga SMA/MA (Sugiyarto, 2015).

Meskipun program ini bukan baru sama sekali, namun bagi TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan senam antikorupsi merupakan hal yang masih baru dan dapat menjadi pelengkap pojok baca literasi antikorupsi. Dalam hal ini, Ibu TN kepala TK ABA Komplek Masjid Perak menyatakan:



“Selama ini kami telah mengembangkan pojok baca literasi antikorupsi, namun baru kali ini mendengar ada senam antikorupsi. Kebetulan di TK ABA Komplek Masjid Perak setiap hari selalu ada senam dengan tema yang berganti-ganti. Dengan adanya senam antikorupsi dapat menambah variasi senam anak-anak di sekolah kami.” (Wawancara dengan TN, Kepala TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan Pada 25 Juni 2022).

Pernyataan TN di atas menunjukkan bahwa senam antikorupsi dapat menjadi pelengkap bagi pengembangan pojok baca literasi antikorupsi yang sudah ada (Sukmayadi, 2020). Jika para peneliti selama ini hanya mengenal insersi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran Pancasila dan Agama Islam (Sutrisno, 2017) maka senam antikorupsi merupakan integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK). Di samping itu, keberadaan senam antikorupsi di TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan terasa lebih istimewa dari pada Senam antikorupsi di TK Griya Bermain Pangkalpinang (Yusmaliana, 2022). Hal ini disebabkan karena Griya Bermain Pangkalpinang belum memiliki pojok baca literasi antikorupsi yang melengkapi senam antikorupsi.

Dalam praktiknya, TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan menyelenggarakan dan membiasakan Senam Antikorupsi setiap hari Jum'at selama 30 menit. Pada awalnya, guru-guru di TK ABA Komplek Masjid Perak dilatih oleh tim pengabdian untuk mempraktikkan senam antikorupsi. Selanjutnya, Tim pengabdian dan para guru praktik bersama-sama dengan seluruh peserta didik di TK ABA Komplek Masjid Perak untuk senam antikorupsi bersama. Saat ini, guru dan siswa di TK ABA Komplek Masjid Perak telah mandiri dan membiasakan senam antikorupsi setiap hari Jum'at. Gambar 4 merupakan situasi senam antikorupsi di TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan.



Gambar 4. Senam Antikorupsi di TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan

Gambar 4 menunjukkan situasi senam antikorupsi di TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan yang diambil dokumentasinya pada Jumat 13 Agustus 2022. Tampak beberapa guru memimpin di depan dan diikuti oleh seluruh peserta didik. Area yang luas dan keberadaan panggung menjadikan senam antikorupsi lebih mudah terkondisikan. Tidak lupa, terdapat spanduk tim Pengabdian ini tentang senam antikorupsi. Selanjutnya, tim pengabdian melakukan pengukuran hasil pelatihan antara sebelum dan sesudah pelatihan senam antikorupsi. Hasil pengukuran menunjukkan terjadi empat perubahan sebagaimana disajikan Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Perbandingan pra dan pasca pelatihan aplikasi *Liveworksheets*

No	Sebelum Program Pengabdian	Setelah program Pengabdian
1	Guru dan siswa TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan dapat melakukan senam antikorupsi.	Guru dan siswa TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan terbiasa melakukan senam antikorupsi.
2	Guru dan siswa TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan mengetahui nilai-nilai antikorupsi.	Guru dan siswa TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan dapat menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.
3	Guru dan siswa TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan mampu mengidentifikasi nilai-nilai antikorupsi.	Guru dan siswa TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan berani melakukan unjuk kerja rencana aksi pencegahan korupsi.
4	Guru dan siswa TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan sehat jasmani tanpa sentuhan antikorupsi.	Guru dan siswa TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan sehat jasmani dan rohani dengan sentuhan karakter antikorupsi.

Berdasarkan Tabel 2 hasil perubahan antara sebelum dan sesudah pelatihan senam antikorupsi di atas, dapat disimpulkan bahwa senam antikorupsi di TK ABA Komplek Masjid Perak efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi. Hal ini sejalan dengan teori Ki Hadjar Dewantara tentang pikir rasio, olahraga, dan olah rasa atau hati. Keberadaan pojok baca literasi antikorupsi sebagai olah rasio, diperkuat dengan olahraga melalui senam antikorupsi dan di matangkan dengan olah hati dengan nilai-nilai keagamaan Dewantara (1962), khususnya ke-Islaman dan ke-Aisyiyahan.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis pembahasan khususnya sebelum dan sesudah pelaksanaan, Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT) ini menemukan bahwa model desa antikorupsi berbasis masjid merupakan upaya pencegahan korupsi yang melibatkan komunitas masyarakat secara luas. Model ini berbeda dengan penetapan desa antikorupsi oleh KPK yang secara politis dilakukan melalui intervensi reformasi birokrasi pemerintahan desa. Desa antikorupsi berbasis masjid merupakan upaya pencegahan korupsi yang sifatnya *bottom up* sedangkan reformasi birokrasi pemerintahan desa lebih bersifat *top down*. Namun demikian, hal ini bukan berarti terjadi dikotomi pembentukan desa antikorupsi, melainkan dapat dilakukan saling melengkapi. Pembentukan desa antikorupsi secara *top down* dapat diperkuat dan di akselerasi melalui pembentukan desa antikorupsi secara *bottom up*, salah satunya desa antikorupsi berbasis masjid.

## Daftar Pustaka

- Abdilah, A. (2009). Inovasi Pertunjukan Teater Tradisional Ludruk Di Wilayah Budaya Arek. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 24(1), 18-28. <https://doi.org/10.31091/mudra.v24i1.1551>
- Anwar, S. (2006). *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Baum, F. E. (2016). *Power and glory: applying participatory action research in public*

- health. *Gaceta Sanitaria*, 30(6), 405–407.  
<https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.05.014>
- Dewantara, K. H. (1962). *Karja Ki Hadjar Dewantara - Bagian Pertama: Pendidikan*. MLPTS.
- Edi, P. (2021, November). KPK Tetapkan Panggungharjo Jadi Desa Antikorupsi Pertama di Indonesia. *Merdeka.com*, 1.
- Kariasa, I. N., & Putra, I. W. D. (2021). Karya Karawitan Baru Manikam Nusantara. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(2), 222–229.  
<https://doi.org/10.31091/mudra.v36i2.1471>
- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2007). Participatory Action Research: origins, approaches and methods. In M. K. Sara Kindon, Rachel Pain (Ed.), *Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting people, participation and place* (hal. 41–48). Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9780203933671-17>
- KPK. (2021). *Buku Panduan Desa Antikorupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Morales, M. P. E. (2016). Participatory action research (PAR) cum action research (AR) in teacher professional development: A literature review. *International Journal of Research in Education and Science*, 2(1), 156–165.  
<https://doi.org/10.21890/ijres.01395>
- Rusqiyati, E. A. (2019, September). Prenggan dan Bener Jadi Percontohan Kampung Koperasi di Yogyakarta. *AntaraYogya*, 5.
- Sugiyarto. (2015, November). Diikuti 100 Ribu Peserta, Senam Anti Korupsi di Bojonegoro Pecahkan Rekor MURI. *Tribunnews.com*, 1.
- Sutrisno, & Murdiono, M. (2017). Pengembangan Modul Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 55–66.
- Suyadi. (2018). Integration of Anti-Corruption Education (PAK) In Islamic Religious Education (PAI) With Neuroscience Approach (Multi-Case Study in Brain Friendly PAUD: I Sleman Kindergarten Yogyakarta). *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(2), 307–330.
- Suyadi. (2020a). *Angket Pengukuran Perilaku Antikorupsi*. UAD Press.
- Suyadi. (2021a). Sertifikat Pencatatan Ciptaan Gendhing Dakwah Antikorupsi: Ketawang Subokastowo. In *Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual* (hal. 1–2). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Suyadi. (2021b). Siasat Gelap Korupsi di Tengah Pandemi COVID-19: Pencegahan Berbasis Religi dan Seni. *Radar Jogja*, 2.
- Suyadi. (2020b). Development of Anti-Corruption Da'i And Mubaligh (Preachers) Affected Physical Distancing Due To Pandemic Covid-19 In Prenggan, Kotagede Yogyakarta. *The 8th International Conference on Educational Research and Innovation (ICERI) 2020*, 153–164.
- Suyadi, Nuryana, Z., & Asmorajati, A. W. (2021). The insertion of anti-corruption education into Islamic education learning based on neuroscience. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 10(4), 1417–1425.  
<https://doi.org/10.11591/ijere.v10i4.21881>
- Suyadi, Sumaryati, Sukmayadi, T., & Waharjani. (2022). Pelatihan Inovasi Media Pembelajaran Literasi dan Numerasi Antikorupsi dalam Kondisi Darurat Covid-19 di TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 93–106.  
<https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7i1.2306>

- Suyadi, Sumaryati, Waharjani, & Sukmayadi, T. (2020). Reading Corner Anti-corruption Literacy in Kindergarten 'Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) Perak Mosque Complex, Anti-corruption Village, Prenggan Village, Kotagede Yogyakarta. *Jurnal Tarbiyatuna*, 11(2), 114-127. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v11i2.3422>
- Suyadi, Waharjani, Sumaryati, Faturrahman, D., & Awhinarto. (2020). Pelatihan da'i antikorupsi di tengah pandemi Covid-19 bagi paguyuban mubaligh dan Pimpinan Ranting Muhamamadiyah/Aisyiyah (PRM/ PRA) desa antikorupsi Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, November*, 194-198.
- Suyadi, Waharjani, Sumaryati, & Sukmayadi, T. (2020). Pelatihan Da'i Antikorupsi bagi Mubaligh-Mubalighah Terdampak Physical Distancing Akibat Pandemi. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(4), 1051-1064. <https://doi.org/10.30653/002.202054.522> Pelatihan
- Suyatmoko, W. (2021). *Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi dan COVID-19 Memperburuk Kemunduran Demokrasi*.
- Triwardani, R., & Rochayanti, C. (2014). Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal. *Reformasi*, 4(2), 102-110.
- Waskito, M. N., & Pambudi, D. I. (2018). Penanaman Nilai Antikorupsi Siswa SD Melalui Pendidikan Keluarga di Kampung Prenggan. *Fundamental Pendidikan Dasar*, 1(3), 173-182.
- Whyte, W. F. (1991). Participatory Action Research. In *Sage Publication*. <https://doi.org/10.3998/mij.15031809.0001.312>
- Wibowo, E. A. (2022). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara. *Tempo.co*, 1.
- Yusmaliana, D. (2022). Senam Antikorupsi: Internalisasi Karakter Antikorupsi Berlandaskan Nilai-Nilai Religius Anak Usia Dini Di. *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman*, 12(01), 62-82.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License